



7 Puskesmas di Denpasar Tak Kantongi IMB

★ Dewan Dorong Segera Angkat Apoteker

DENPASAR, NusaBali

Dari 11 puskesmas di Kota Denpasar, ternyata 7 diantaranya tak kantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini diketahui dari penelusuran data di Badan Perizinan Kota Denpasar. Dari 11 puskesmas yang ada di Kota Denpasar hanya ada empat yang mengantongi IMB yakni puskesmas di Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat, puskesmas di Kelurahan Penatih Denpasar Timur, puskesmas di Desa Padangsambian Kaja Denpasar Utara serta puskesmas di Desa Dauh Puri Kaja Denpasar Utara.

Menurut anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar yang membidangi masalah hukum, AA Susruta Ngurah Putra, kelambanan Dinkes mengurus IMB ini menjadi gambaran bahwa Pemerintah Kota Denpasar selama ini tidak transparan tentang segala kekurangan yang ada di Kota Denpasar. "Ini masalah prinsip soalnya. Ayolah lebih transparan kepada masyarakat. Jangan kekurangan ditutup-tutupi. Bahkan kami sudah sering mendesak, tetapi tidak ada tindakan nyata," ujarnya, Senin (28/9).

Ia juga mempertanyakan kinerja dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam hal pengurusan izin tempat-tempat pelayanan umum kepada masyarakat. Apalagi ada kewajiban pemerintah terutama Dinas Kesehatan ke depan untuk menjadikan puskesmas pelayanan kesehatan masyarakat yang mandiri.

Selain itu, Susruta juga mengkritisi mengenai tidak adanya apoteker di setiap puskesmas. Sebab, apoteker sendiri mempunyai peran yang cukup strategis ke depan untuk memaksimalkan pelayanan

terutama soal pemberian obat dan pengadaan obat untuk masyarakat. "Kan bisa diangkat melalui kontrak. Apa susahnya Pemkot hanya mengangkat tenaga profesional seperti apoteker," ujarnya.

Dia sepakat dengan pernyataan dari BBPOM Denpasar terkait mengenai keharusan puskesmas mempunyai apoteker. "Obat ini kan racun, jika misalkan tidak diberikan oleh tenaga profesional, bisa salah sampai ke tangan masyarakat. Ini bukan persoalan sederhana, tetapi penting dan segera," tegasnya.

Dikatakan Susruta, Pemkot Denpasar harus mengambil tindakan secepatnya, agar persoalan ini tidak berlanjut.

Keadaan Kota Denpasar yang semakin kompleks apalagi ditambah sebagai ibu Kota Provinsi Bali, kata dia, sudah seharusnya memberikan contoh, dan memperhatikan hal-hal semacam ini.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Luh Sri Armini mengakui kebenaran hal tersebut. Ia beralasan bahwa puskesmas yang baru dibangun saja yang mengantongi IMB. "Ya, yang bangunan baru sudah ada IMB," jelasnya melalui pesan singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), pada tahun 2016 mendatang, seluruh puskesmas harus mengantongi Izin Operasional yang salah satunya harus melampirkan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), termasuk 11 Puskesmas yang ada di Kota Denpasar. n

Edisi : Selasa, 20 Sept 2015
Hal : 3



BPKP Selesaikan Audit Kasus Perdin

★ Kasus Dugaan Penyimpangan di PD Pasar Distop

DENPASAR, NusaBali

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Wilayah Bali akhirnya menyelesaikan audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar. Kini penyidik tinggal menunggu surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk penetapan tersangka.

Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir yang dikonfirmasi mengatakan untuk audit kerugian negara yang dilakukan BPKP dalam kasus dugaan korupsi Perdin DPRD Kota Denpasar sudah selesai pekan lalu. "Sekarang kasusnya sudah dilimpahkan ke bagian Pidana Khusus (Pidsus) untuk ditindak lanjuti," ujar Syahrir, Senin (28/9).

Meski tidak menjelaskan secara detail kerugian negara dalam audit BPKP tersebut, namun dipastikan sudah ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. Syahrir sendiri memastikan dalam waktu dekat Pidsus Kejari Denpasar akan mengeluarkan Sprindik dan menentukan tersangka.

"Sekarang masih diproses di Pidsus," lanjutnya. Dalam kasus Perdin, penyidik awalnya meneliti berkas-berkas soal perjalanan dinas yang dilakukan SKPD Pemkot Denpasar dan

perjalanan dinas anggota DPRD Kota Denpasar pada 2013 lalu. Pemeriksaan ini berdasarkan temuan BPKP terkait perjalanan dinas tidak wajar yang mencapai Rp 500 juta.

Nah, dari temuan BPKP Rp 500 juta terkait perjalanan dinas yang tidak wajar ini memang sudah dikembalikan semuanya. Yang paling banyak mengembalikan, yaitu Sekretaris DPRD Kota Denpasar yang mencapai Rp 250 juta. Sisanya dikembalikan SKPD lainnya di Pemkot Denpasar.

Berbeda dengan kasus Perdin yang akan segera menetapkan tersangka, kasus dugaan korupsi di PD Pasar Kota Denpasar yang juga ditangani Kejari Denpasar akhirnya dihentikan. Syahrir mengatakan dari hasil Pulbaket (Pengumpulan Bahan Keterangan) dan Puldata (Pengumpulan Data), tidak ditemukan adanya penyimpangan.

Sebelumnya, penyidik sempat mendalami temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait penyertaan modal di PD Pasar pada 2013 lalu. Penyidik juga mendalami dugaan korupsi dalam pengelolaan pasar yang berada di bawah kendali PD Pasar Kota Denpasar. "Sudah kami hentikan karena tidak ditemukan penyimpangan," pungkas Syahrir. **rez**

Edisi : Selasa, 29 Sept 2015

Hal : 3



Denpasar Junction Diganjar SP



● NUSABALI/HENDRA

SATPOL PP Kota Denpasar bersama Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) Kota Denpasar melakukan sidak proyek Denpasar Junction, di Jalan Teuku Umar, Denpasar, Senin (28/9) siang.

"Kami minta pengelola Denpasar Junction untuk mengurus kelengkapan izin dulu. Kalau sudah izin keluar, silakan lanjutkan pembangunan"

DENPASAR, NusaBali
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar bersama Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) melakukan sidak ke lokasi pembangunan Denpasar Junction, Jalan Teu-

ku Umar, Senin (28/9). Sidak tersebut, dipimpin langsung Kasatpol PP Kota Denpasar, IB Alit Wiradana didampingi Kabid penegakan Perundang-Undangan Daerah, I Wayan Wirawan, dan Kasi Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan, Gede Sudana serta PPNS. Dalam sidak yang diterima Kuasa Hukum Denpasar Junction, Gede Widiatmika SH tersebut, Satpol PP memberikan surat peringatan (SP).

Alit Wiradana di sela-sela sidak mengatakan, akan terus memantau dan mengawasi terkait pembangunan Denpasar Junction yang kini bernama

Edisi : Selasa, 29 September 2015

Hal : 3



Level 21 Mall. "Pada prinsipnya kami akan mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran," kata Alit Wiradana. Dalam sidang kemarin tidak ditemukan adanya aktivitas pekerja di areal pembangunan Denpasar Junction. "Kalau ada indikasi

pelanggaran kami akan mengambil langkah tegas dan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait," tegas Alit Wiradana.

Sementara Kabid Pengendalian dan Penataan Kota Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Kota Denpasar, Dewa Made Wesnawa Wedagama, mengatakan, selama IMB belum keluar maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Denpasar Junction. "Kami sudah mengambil langkah tegas

sesuai standar operasi prosedur (SOP) dengan melayangkan surat peringatan dua," ujar Wesnawa Wedagama.

Dia menegaskan, kalau ada kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan maka kembali akan melayangkan surat peringatan tiga sesuai pelanggaran yang dilakukan. "Kami minta pengelola Denpasar Junction untuk mengurus ke engkapan izin dulu. Kalau sudah izin keluar, silakan lanjutkan pembangunan," tegasnya.

Sementara Kuasa Hukum Denpasar Junction, Gede Widiatmika, mengatakan, pembangunan Denpasar Junction sudah melalui prosedur dan taat pada aturan. Tidak ada memotong dan mengampulasi masalah aturan. "Kami orang yang taat pada mekanisme dan aturan, dan kami harus menjaga kredibilitas tersebut," kata Widiatmika. Lebih lanjut Widiatmika mengaku, proses perizinan sedang berjalan dan masih dalam tahap pengkajian tim ahli bangunan DTRP. Karena proses permohonan perizinan di DTRP sudah sampai tiga kali merevisi gambar, sehingga izin yang dimohon belum bisa keluar. "Kami tidak mau melanggar dan harus mengikuti aturan yang ada. Sekarang kami sudah menghentikan aktivitas pembangunan," kata mantan ketua LBH Bali ini. **n**

Edisi : Selasa, 29 Sept 2015

Hal : 3



Finalisasi Draft Revisi UU Perimbangan

Keuangan Pusat-Daerah

Pansus Sepakat Undang

Gubernur dan Bupati

DENPASAR, NusaBali

DPRD Bali terus kebut perjuangan merebut dana bagi hasil dari sumbangan devisa pariwisata Rp 47 triliun per tahun ke pusat, melalui revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah dan Pusat serta revisi UU Nomor 64 Tahun

1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali-NTB-NTT. Sebelum ajukan draft revisi UU ke pusat, Panitia Khusus (Pansus) bentukan DPRD Bali lebih dulu bakal undang Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Bali.

Pansus Revisi UU 33/2004 dan

UU 64/1958 bentukan DPRD Bali sudah menggelar rapat marathon di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (28/9). Rapat kemarin dipimpin Ketua Pansus Wayan Adnyana (Fraksi Demokrat DPRD Bali), melibatkan anggota Pansus seperti Ngakan Made Samudra (Fraksi De-

mokrat), Ida Gede Komang Kresna Budi (Fraksi Golkar), dan I Wayan Rayun (Fraksi PDIP). Wakiul Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry (dari Fraksi Golkar) juga hadir bersama Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Selasa, 29 sept 2015

Hal : 15



Pansus Sepakat Undang Gubernur dan Bupati

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Tama Tenaya (Fraksi PDIP) yang sekaligus anggota Pansus, serta tim ahli dari fraksi-fraksi.

Dari rapat kemarin, Pansus sepakat mengundang Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan para Bupati/Walikota se-Bali untuk diajak duduk bersama membahas masalah revisi UU 33/2004 dan UU 64/1958. Ketut Tama Tenaya menegaskan, Pansus berupaya melibatkan Gubernur dan para Bupati/Walikota, karena perjuangan merebut dana pusat ini sudah bukan lagi perjuangan kelompok, tapi sudah gerakan Provinsi Bali.

"Bukan hanya untuk meng-golkan revisi semata, tapi apa yang nanti bisa didapatkan provinsi dan kabupaten. Terutama, kabupaten penghasil devisa pariwisata terbesar seperti Badung. Tadi semua sudah sepakat revisi Undang-undang dan finalisasinya mengundang kepala daerah," ujar Tama Tenaya se usai rapat kemarin.

Menurut Tama Tenaya, pihaknya tak ingin nanti setelah perjuangan sukses, kemudian ada duit, lalu duitnya malah jadi ajang rebutan. "Biasanya kan begitu, kalau sudah ada hasil, mulai ribut. Makanya, kita berjuang bersama-sama, lalu bersama-sama pula nanti menikmati hasilnya. Kami

usulkan undang Gubernur dan Bupati/Walikota," ujar politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.

Tama Tenaya menegaskan, para Bupati/Walikota harus bersedia hadir ketika diajak rapat merumuskan dan memfinalkan perjuangan revisi UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut. "Kadang ego daerah itu masih nyantol, sehingga untuk diajak rapat membahas Bali saja susah sekali. Perlu ada kesadaran itu. Sudah-lah, mari tinggalkan ego, mari berbuat bersama untuk Bali," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan dari hasil rapat Pansus kemarin, draft revisi UU 33/2004 dan UU 64/1958 sudah disepakati segera dibawa ke pusat. "Intinya, rapat tadi mendesak dilakukan revisi UU 33/2004 dan UU 64/1958. Sebab, ini sangat mendesak dari kajian teori, keadilan, desentralisasi, keberlakuan hukum, dan konsep good government, karena UU tersebut sangat tidak adil," tandas Sugawa Korry.

Politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini menegaskan beberapa pasal dari UU 33/2004 yang menjadi pokok usulan untuk direvisi meliputi Pasal 1

terkait pengertian 'sumber daya lainnya' yang melingkupi pariwisata. Kemudian, Pasal 6 ayat (2), penambahan Pasal 7A, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4), penambahan Pasal 22A, serta perubahan Pasal 13. "Seluruh pasal ini yang jadi target untuk direvisi," tegas Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.

Setelah final, lanjut Sugawa Korry, draft revisi nantinya akan dikirim kepada DPD RI Dapil Bali dan DPR RI Dapil Bali, juga dikirimkan kepada Gubernur Bali, serta para Bupati/Walikota se-Bali. "Gubernur dan Bupati/Walikota diminta untuk memberikan masukan dan mereka harus mengetahu. Selama 10 hari prosesnya. Setelah itu, kita undang DPRD Bali untuk diskusi penyempurnaan," ujar Sugawa Korry.

Sebelumnya, Gubernur Pastika ketika bertindak sebagai *keynote speaker* dalam seminar sehari 'Mencari Format Perimbangan Keuangan Daerah yang Adil dan Usulan Revisi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali-NTB-NTT' di Gedung Dewan, 9 September 2015, mengatakan Bali selama ini sumbang devisa dari sektor pariwisata sebesar Rp 47 triliun per tahun ke pusat. Namun, Bali tidak banyak dapat reward dari pusat.

Karena itu, Gubernur Pastika

merekomendasikan agar UU 33/2004 dibuatkan usulan revisi, sehingga hubungan keuangan pusat dan daerah diatur lebih rasional yang memenuhi prinsip keadilan dan pemerataan antar daerah. Ini penting sebagai keperluan re-investasi untuk menjaga kelestarian budaya, kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang menunjang sektor pariwisata.

Bali tidak punya sumber daya alam, tapi memiliki pariwisata. "Daerah yang mempunyai sumber daya alam akan semakin kaya, sedangkan daerah tanpa sumber daya alam akan semakin miskin, terutama yang sumber PAD-nya terbatas," ujar Pastika kala itu. Makanya, perlu revisi UU 33/2004 dan UU 64/1958. "Karena tidak ada sumber daya alam ini, perlu ada revisi perimbangan keuangan daerah dan pusat," imbuhnya.

Pastika pun meminta DPRD Bali secara konsisten memperjuangkan supaya tujuan Bali untuk mendapatkan dana perimbangan daerah bisa tercapai. "Kami sangat mendukung seminar dan langkah Dewan untuk berjuang bersama-sama ke pusat secara objektif, demi pembangunan di Bali," katanya. **nat**

Edisi : Selasa, 29 sept 2015

Hal : 15



Masih Ada Aksi Bulldoser di Jatiluwih ✓ Penjabat Bupati 'Nyerah'



Perataan tanah di WBD Subak Jatiluwih, beberapa waktu lalu.

DENPASAR, NusaBali

Meski tengah disorot berbagai pihak, aktivitas bulldoser untuk bangun areal parkir di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) Subak Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan tetap saja berlangsung.

Sedangkan Penjabat Bupati Tabanan, Wayan Sugiada, pun 'menyerah' atas apa yang terjadi di WBD Jatiluwih.

Ketua Pusat dan Penelitian (Puslit) Subak Unud, Prof Dr

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Penjabat Bupati 'Nyerah' ✓

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Ir Wayan Windia, mengakui pihaknya mendapat laporan masih ada aktivitas bulldoser di WBD Subak Jatiluwih. Padahal, masalah ini sedang jadi sorotan luas, bahkan Pemprov Bali minta stop dulu segala bentuk pembangunan di Jatiluwih, sebelum ada Rancangan Detail Tata Ruang (RDTW). "Saya dapat pengaduan dari masyarakat tentang aktivitas bulldoser di Subak Jatiluwih yang terdaftar di UNESCO sebagai WBD," jelas Prof Windia di Denpasar, Senin (28/9).

Seharusnya, lanjut Prof Windia, pihak-pihak yang melakukan kegiatan di WBD Jatiluwih menghormati apa yang digariskan. Termasuk, hotmati hasil pertemuan Pemprov Bali dan Pemkab Tabanan yang merekomendasikan stop sementara segala pembangunan di WBD Jatiluwih. "Kabupaten Tabanan harusnya yang mengikuti hasil

keputusan rapat dengan Asisten II Pemprov Bali beberapa waktu lalu. Tapi, saya dapat laporan dari masyarakat masih ada aktivitas bulldoser di WBD Subak Jatiluwih," ujarnya.

Prof Windia mengaku sangat mendukung pemikiran Gubernur Bali Made Mangku Pastika bahwa ke depan pariwisata di Jatiluwih harus dibuat berkualitas. Bukan soal jumlah wisatawan yang datang, tapi turis yang berkunjung harus berkelas. "Jatiluwih harus menjadi wisata berkualitas, orang-orang yang datang pun berkelas, sehingga menjadi wisata kelas dunia. Kalau pengelolaannya seperti sekarang, Jatiluwih bias jadi pariwisata murahan."

Sementara itu, Penjabat Bupati Tabanan Wayan Sugiada terkesan 'menyerah' dengan kondisi di WBD Jatiluwih. Sugiada mengaku tidak bisa melarang aktivitas masyarakat di Jatiluwih. "Di satu sisi, mereka (krama Jatiluwih) punya lahan.

Kami tidak bias melarang mereka. Kami datang dengan mengajak Satpol PP, mereka justru tambah semangat melaksanakan kegiatan. Kami serba salah ini," ujar Sugiada saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Senin kemarin.

Menurut Sugiada, memang ada status quo di Jatiluwih sembari menunggu RDTR di Catur Angga Jatiluwih. "Kami masih dalam proses kerja menyusun RDTR ini. Sebenarnya, kita sudah lakukan sosialisasi agar upaya konservasi diutamakan, jangan dibeton. Tapi, masyarakat punya lahan sendiri, bagaimana lagi berbuat? Masyarakat ngotot, itu lahan mereka," keluh Sugiada.

Sugiada pun meminta media turut menciptakan suasana kondusif. Apalagi, ini jelang Pilkada 2015. "Saya sih bukan nyerah, tapi serba susah. Seolah-olah kami jadi berhadapan dengan masyarakat. Kami bukan diam, tapi sudah berusaha," katanya. **nat**

Edisi : Selasa, 29 sept 2015

Hal : 1 dan 15



Pejabat BPN Gianyar Dibidik Jadi Tersangka

★ Dalam Kasus Dugaan Mark Up Lahan By Pass IB Mantra ✓

DENPASAR, NusaBali

Setelah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kasus dugaan mark up dalam pembebasan lahan Jalan By Pass Prof IB Mantra, Gianyar, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kembali membidik tersangka baru. Kali ini, pejabat di Badan Pertanahan Negara (BPN) Gianyar yang dibidik sebagai tersangka.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan mengatakan dari hasil gelar perkara (ekspose) yang dilakukan penyidik, disebutkan jika pihak BPN Gianyar harus ikut bertanggung jawab dalam kasus ini. Bahkan, tim jaksa juga sudah diperintahkan langsung untuk mengusut keterlibatan BPN.

"BPN memiliki peran besar dalam kasus ini. Makanya penyidi-

dik diminta mengusut tuntas," tegas Ashari pada, Senin (28/9). Dalam kasus ini, BPN Gianyar diduga menerbitkan sertifikat yang ilegal. Apalagi ada tiga kali pergantian sertifikat dari milik pribadi menjadi milik negara dan kembali lagi menjadi milik pribadi. Di sinilah nantinya penyidik akan mengusut siapa saja pejabat BPN Gianyar yang terlibat sehingga sertifikat yang awalnya milik negara bisa berubah menjadi milik pribadi. "BPN baru saja mengeluarkan sertifikat milik negara. Tapi kembali mengeluarkan sertifikat milik pribadi di objek yang sama," terangnya.

Seperti diketahui sebelumnya, setelah menetapkan BW (pemilik tanah) sebagai tersangka dalam kasus mark up pembebasan lahan By Pass

IB Mantra, penyidik kembali menetapkan tiga tersangka baru, yaitu I Gede WB (Kepala Desa Keramas), I Wayan SD (Kepala Dusun Palak, Keramas) dan I Made SR (Kadus Palak).

Tersangkutnya Kepala Dusun dan aparat desa tersebut berawal saat BW menjual tanah yang akan dipakai kepada seseorang. Setelah ada kabar pembebasan lahan, BW kembali mengklaim tanah tersebut dan membuat sertifikat di BPN Gianyar. Dalam pembuatan sertifikat inilah diduga aparat dusun dan desa setempat ikut terlibat dengan menandatangani rekomendasi ke BPN. Tidak lama setelah itu, BPN mengeluarkan sertifikat atas tanah tersebut yang langsung dijual oleh BW kepada orang lain. rez

Edisi : Selasa, 09 Sept 2015

Hal : 5



Retribusi Wisatawan Banyak Lenyap ✓

Imbasnya, PAD Klungkung dari retribusi kawasan wisata Lembongan banyak hilang.

SEMARAPURA, NusaBali

Klungkung berencana menetapkan satu pintu atau pintu masuk tunggal untuk mendeteksi kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Nusa Penida, khususnya Lembongan dan sekitarnya. Upaya tersebut untuk mendapatkan data kunjungan wisatawan yang pasti ke Lembongan dan sekitarnya.

Data wisatawan ke Lembongan atau Nusa Penida sering tak sesuai fakta di lapangan. Hal itu tentu berimbas pada pendapatan Pemkab Klungkung yang tidak maksimal. PAD Klungkung dari retribusi kawasan wisata Lembongan, banyak hilang.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengakui hal terse-



• IST
Para wisatawan turun dari kapal Bounty Cruise di Palabuhan Bonoa, Badung, setelah berwisata di Nusa Lembongan, Nusa Penida.

but, Senin (28/9). Di sela-sela penjelasan soal pelaksanaan Festival Nusa Penida II, Jumat (2/10) - Minggu (4/10), Bupati Suwirta menyatakan banyak pintu masuk ke Lembongan diduga menjadi salah satu penyebab timpangnya data wisatawan. "Karena itu ke depan kita akan kerjasama dengan kabupat-

en lain," jelasnya didampingi Sekkab Klungkung I Putu Gede Winastra, dan beberapa pejabat lainnya.

Kerjasama tersebut menyangkut pendataan wisatawan ke Lembongan atau Nusa Penida.

Sedangkan di Lembongan dan Nusa Penida ada banyak muara dimanfaatkan penyandaran

Edisi : Selasa, 29 Sept 2015
Hal : 6



kapal atau sampan wisatawan. Kondisi ini tidak sedikit luput dari pantauan.

Selain mengupayakan kerjasama dengan kabupaten/kota, rencananya dengan penambahan tenaga pendataan di Lembongan dan Nusa Penida. Selain itu, data kunjungan wisatawan ke Nusa Penida juga tergantung dari kejujuran operator travel agent yang mengajak wisatawan menikmati Lembongan dan Nusa Penida.

Data Disbudpar Klungkung, jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Penida, dominan ke Lembongan, menunjukkan peningkatan. Pada 2013, kunjungan wisatawan ke Lembongan, Nusa Penida mencapai 185.909 orang, dan 2014 mencapai 220.751 orang, dan hingga Juli 2015 mencapai 146.465 orang.

Diperkirakan jumlah wisatawan ke Lembongan/Nusa Penida, hingga akhir 2015 melampaui jumlah kunjungan 2014. Pada Agustus 2015, kunjungan wisatawan terbilang membludak hingga ada yang tak

tertampung di Lembongan.

Untuk diketahui, wisatawan yang masuk ke Lembongan/Penida melalui beberapa pintu diantaranya di Sanur, Denpasar, Bena, Badung, Padangbai, Karangasem). Selain itu dari Gili Trawangan, NTB, dari daratan Klungkung terutama dermaga Pantai Kusamba. Untuk menikmati keindahan alam laut Lembongan/Nusa Penida, setiap wisatawan dikenakan retribusi Rp 7.000/orang.

Terkait persiapan pelaksanaan Festival Nusa Penida II, Bupati Suwirta menyatakan sudah sampai 90 persen. Tema Festival Nusa Penida II, kata Bupati Suwirta, 'Enjoy The Blue Paradise'; Nusa Penida sebagai sorga biru yang memikat patut dikunjungi wisatawan. "Launching sudah kita lakukan di Kementerian Pariwisata beberapa waktu lalu," kata Bupati.

Festival Penida II menekankan tiga aspek yakni culture (budaya), Nature (keindahan alam) dan Adventure (petualangan) dengan anggaran Rp 855 juta. **k17**

Edisi : Selasa, 00 sept 2015

Hal : 6